# Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Jetis

Tahun 2021-2026

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

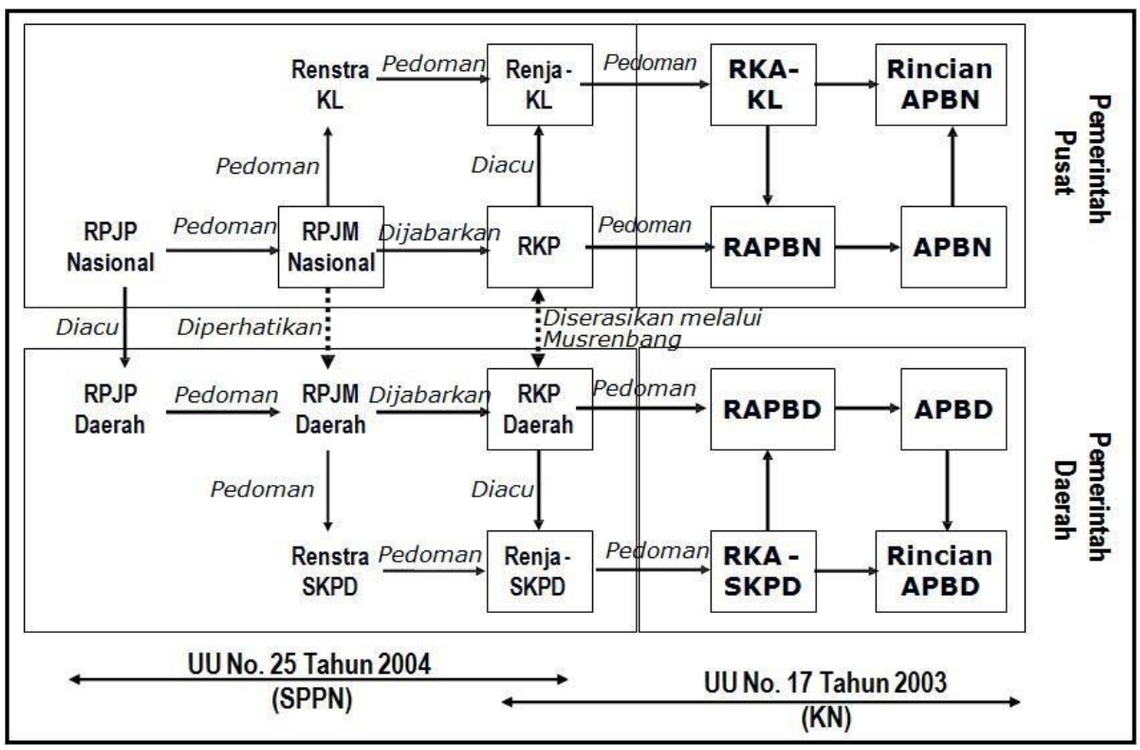


Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Pada awalnya Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

### 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud meberikan arahan rencana yang memmuat program kegiatan dan sub kegiatan utk mencapai tujuan dan ssaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yg disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
b. Merumuskan indikator dan targed kinerja terukur yang akan dicapai selama periode renstra perangkat daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD)

## 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.1.3. Telaahan RTRW dan KLHS

3.1.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

**Struktur Organisasi Kapanewon Jetis**

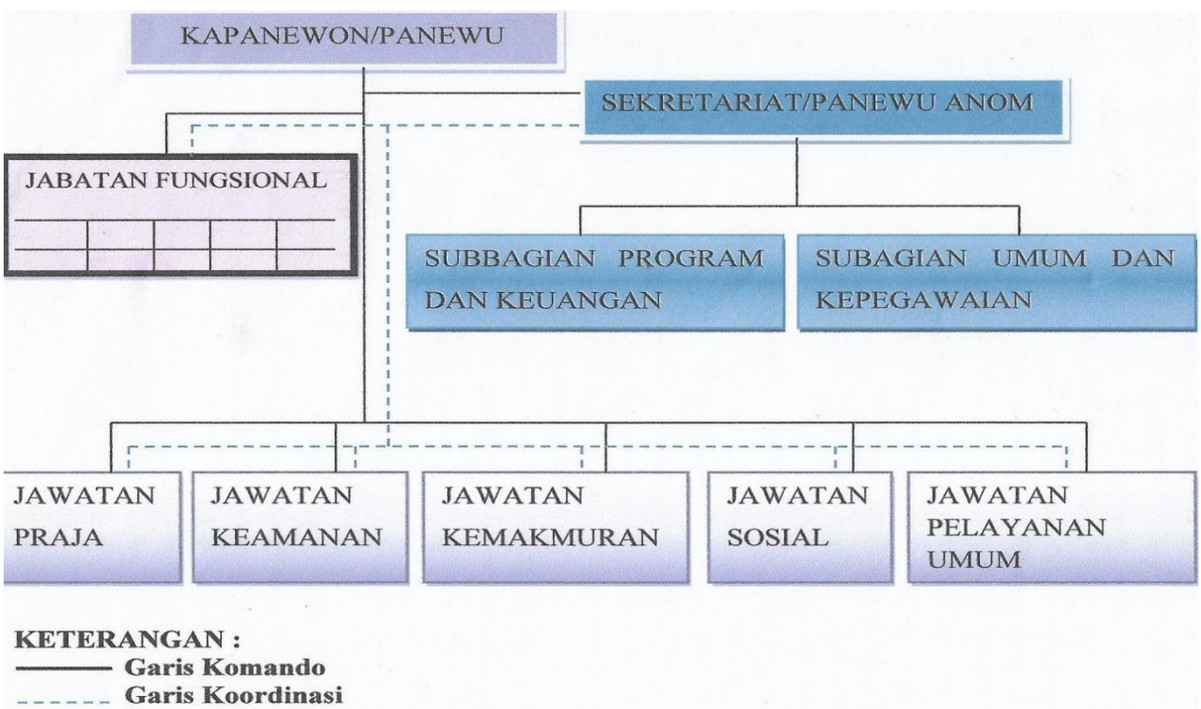


Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat Kapanewon**

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesekretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :.

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. pengelolaan barang milik daerah;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyusunan rencana program Kapanewon;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Jawatan Praja**

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
   4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
   5) pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan minimal
e. (SPM) di wilayah Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat
g. Kapanewon;
h. pengoordinasian administrasi pertanahan;
i. pengoordinasian administrasi kependudukan;
j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    4) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    5) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
    6) fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
    7) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
m. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
n. pemerintahan di tingkat Kapanewon;
o. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

**5. Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Jawatan Sosial**

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

### 2.2.1 .Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 17 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan IV | 3 orang | |
| 2 | Golongan III | 8 orang | |
| 3 | Golongan II | 6 orang | |
| Jumlah Total | | 17 orang | |

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasca Sarjana ( S2 ) | 3 | |
| 2 | Sarjana ( S1) / D IV | 6 | |
| 3 | Sarjana Muda/D3 | 2 | |
| 4 | SMA/Sederaajat | 5 | |
| 5 | SMP | 1 | |
| Jumlah Total | | 17 | |

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Jetis

| NO | JABATAN | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Panewu ( Eselon III/a) | 1 | |
| 2 | Panewu Anom ( Eselon III/b ) | - | sementara Plt Kepala Jawatan Keamanan |
| 3 | Kapala Jawatan | 5 | |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 | |

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 11 orang | |
| 2 | Perempuan | 6 orang | |
| Jumlah Total | | 17 orang | |

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2021-2026

| No | Formasi Jabatan Ideal | Kualifikasi Pendidikan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Panewu | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Panewu Anom | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Analis Tata Laksana | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pengadministrasi Umum | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | SMA/SMK/MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pramu Bakti | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bendahara | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Verifikator Keuangan | D III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Formasi Jabatan Ideal | Kualifikasi Pendidikan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 12 | Kepala Jawatan Praja | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Analis Pemerintahan Daerah | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Kepala Jawatan Keamanan | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Analis Keamanan | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pengadministrasi Umum | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Kepala Jawatan Pelayanan Umum | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Analis Pelayanan | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pengelola Layanan Operasional | D III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informai | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Kepala Jawatan Kemakmuran | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Analis Program Pembangunan | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Pengelola Perekonomian, Pembangunan | S 1 / D IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Formasi Jabatan Ideal | Kualifikasi Pendidikan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | dan Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 24 | Kepala Jawatan Sosial | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Analis Kemasyarakatan | S 1 / D IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Pengadministrasi Umum | SMA/SMK/MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Arsiparis Pelaksana | D III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun** | | | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** |
| **Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN** | | | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis.

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.4 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana )

| NO | NAMA | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung kantor | 1 | unit | Cukup Baik |
| 2 | Rumah dinas Panewu | 0 | unit | |
| 3 | Musholla | 0 | unit | |
| 4 | Papan Nama OPD | 1 | unit | Cukup Baik |
| 5 | Kendaraan roda 4 (empat) | 1 | unit | Cukup Baik |
| 6 | Kendaraan roda 2 (dua) | 6 | unit | Cukup Baik |
| 7 | Mesin ketik | 0 | buah | |
| 8 | Personal Computer ( PC ) | 15 | unit | 65% Baik |
| 9 | Laptop | 4 | unit | 50% Baik |
| 10 | Printer | 8 | unit | 85% Baik |
| 11 | Printer scaner | 5 | unit | 75% Baik |
| 12 | Scaner | 1 | unit | Baik |
| 13 | CCTV | 0 | unit | |
| 14 | Proyektor | 2 | unit | 50% |
| 15 | TV | 2 | unit | Baik |
| 16 | Jam Dinding | 8 | unit | 50% Baik |
| 17 | Amplifier | 2 | unit | 85%Baik |
| 18 | Running text | 1 | unit | Baik |
| 19 | Kipas angin | 13 | unit | 50% Baik |
| 20 | Kompor gas 2 tungku | 2 | unit | Cukup Baik |
| 21 | Meja kerja | 28 | buah | 75% Baik |
| 22 | Kursi kerja | 35 | buah | 75% Baik |
| 23 | Kursi rapat | 70 | buah | 75% Baik |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | .Meja rapat | 14 | buah | 75%<br>Baik |
| 25 | Handphone | 3 | unit | Baik |
| 26 | Felling Cabinet | 6 | buah | 65%<br>Baik |
| 27 | Almari arsip | 9 | buah | 65%<br>Baik |
| 28 | Telepon | 1 | unit | rusak |
| 29 | AC | 14 | unit | 60%<br>Baik |
| 30 | Meja pelayanan | 4 | buah | 85%<br>Baik |
| 31 | Kursi tunggu | 4 | buah | Baik |
| 32 | Jenset | 2 | unit | Baik |

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 4.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

| | Indikator Kinerja | Target Renstra Tahun 2016 – 2021 | | | | | | Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021 | | | | | | Rasio Capaian | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | (13)=(9)/(3) | (14)=(10)/(4) | (15)=(11)/(5) | (16)=(12)/(6) | (17)=(13)/(7) | (18)=(14)/(8) |
| A. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IKM Kapanewon | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 79.11 | 94.70 | 94.75 | 89.06 | 92.77 | 92.22 | 1.19 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.00 |
| 2 | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 70 | 70 | 83 | 95 | 100 | 100 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 70 | 75 | 83.33 | 88 | 100 | 90 | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 70 | 70 | 83.33 | 85 | 58.3 | 100 | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 0.58 | 1.00 |

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. **Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu**

Adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan

(RKPDes, RPJMDes dan APBDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

**3. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes**

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Jetis dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub

kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

**4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon**

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibgi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

### 4.3.2 Kinerja Keungan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran kapanewon jetis tahun 2020-2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul**

| No | Uraian Sumber Keuangan | Anggaran | | | | | | Realisasi 2016 – 2021 | | | | | | Rasio Realisasi dan Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Belanja tidak langsung | - | 1,577,278,000 | 1,626,057,471 | 1,250,233,338 | 1,522,020,217 | | - | 1,577,278,000 | 1,626,057,471 | 1,071,158,578 | 1,114,647,271 | - | - | 85.50% | 91.48% | 85,56% | 73,23% | |
| | Belanja Pegawai | - | 1,577,278,000 | 1,626,057,471 | 1,250,233,338 | 1,522,020,217 | | - | 1,623,778,000 | 1,721,117,471 | 1,071,158,578 | 1,114,647,271 | - | - | 85.50% | 91.48% | 85,56% | 73,23% | 0.00% |
| | Belanja langsung | - | 849,065,500 | 952,345,500 | 981,450,000 | 612,500,000 | | - | 849,065,500 | 952,345,500 | 974,125,477 | 610,904,196 | - | - | 89.80% | 95,40% | 99,25% | 99,74% | |
| | Belanja pegawai | - | 46,500,000 | 95,060,000 | 98,780,000 | 96,240,000 | | - | 95,060,000 | 98,780,000 | 97,070,000 | 96,240,000 | - | - | 92,36% | 96,21% | 98,27% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Barang dan Jasa | - | 762,565,500 | 773,185,500 | 800,207,000 | 452,435,000 | | - | 762,565,500 | 773,185,500 | 794,592,477 | 450,839,196 | - | - | 87.26% | 94.87% | 99,30% | 99,65% | 0.00% |
| | Belanja Modal | - | 40,000,000 | 84,100,000 | 82,463,000 | 63,825,000 | | - | 40,000,000 | 84,100,000 | 82,463,000 | 63,825,000 | - | - | 89.80% | 100.00% | 100% | 100% | 0.00% |
| | Belanja operasi | | | | | | 2,936,422,836 | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pegawai | | | | | | 2,191,051,836 | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja barang dan jasa | | | | | | 745,371,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja modal | | | | | | 68,695,000 | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **2,033,513,650** | **2,426,343,500** | **2,578,402,971** | **2,231,683,338** | **2,134,520,217** | **3,005,117,836** | | | | **2,045,284,055** | **2,134,520,217** | **-** | **-** | **86.16%** | **92.91%** | **91,65%** | **80,84%** | **0.00%** |

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
3. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
4. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
5. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
6. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
7. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Jetis menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Jetis serta kondisi terkini yang dihadapi :

A. Tantangan:
    1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, maka bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi:

2. Mewujudkan Bantul smart cyti memberikan tantangan khusus bagi kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan public berbasis teknologi informasi menuju smart kapanewon:
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat;

B. Peluang:

1. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
2. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis
3. Potensi wisata alam dan wisata buatan, yang dapat dikonsep dengan wisata edukasi yang aman (dari Covid 19) dan nyaman bagi anak-anak, sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ketrampilan kepada pengunjung, sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat

.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisa permasalahan Kapanewon Jetis dengan Metode Pohon Masalah.

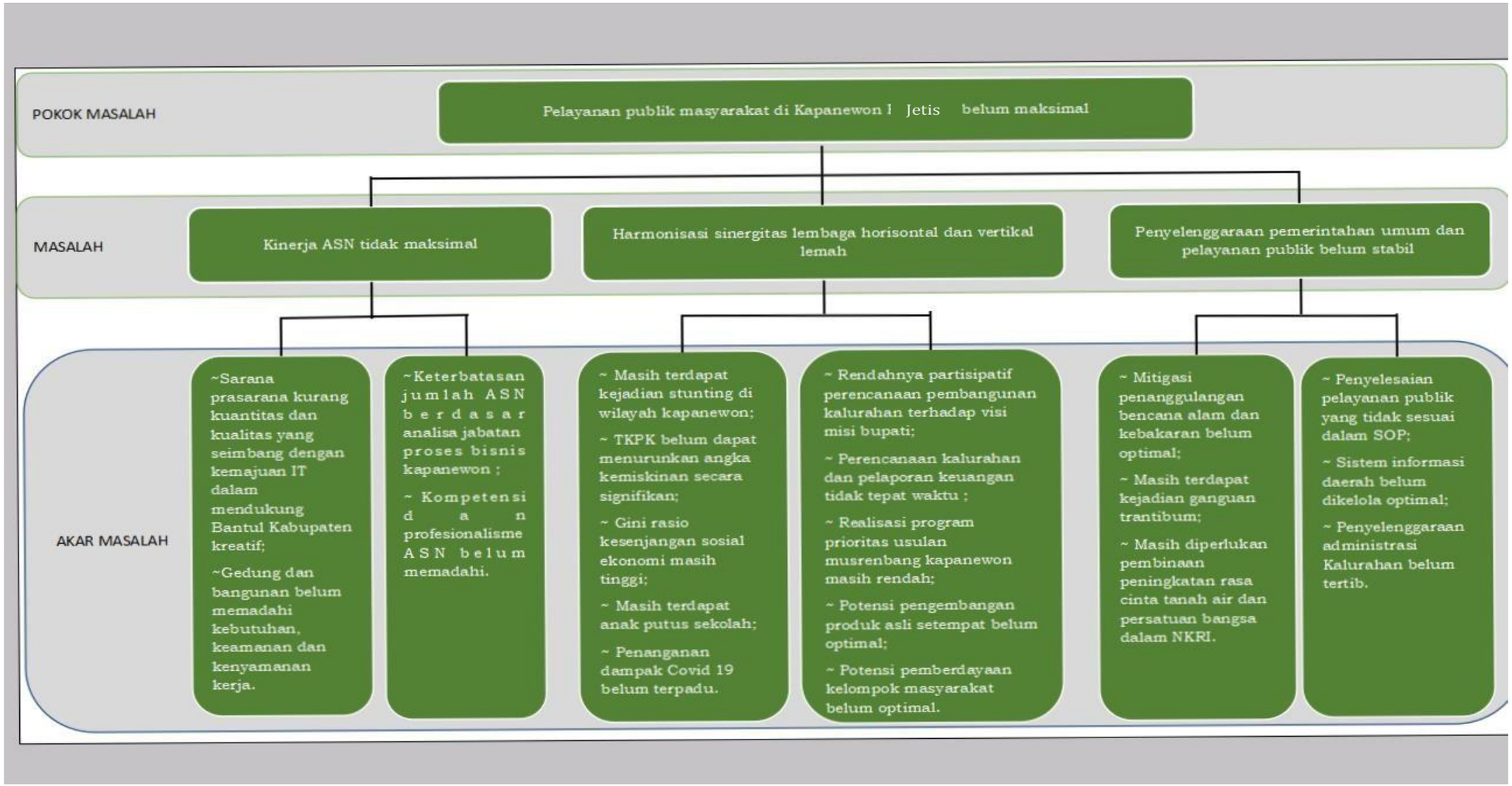

Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Jetis

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Jetis belum maksimal | Kinerja ASN tidak maksimal | Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif. |
| | | Gedung dan bangunan belum memadahi kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja. |
| | | Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon. |
| | | Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadahi. |
| | Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah | TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan |
| | | Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon |
| | | Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi |
| | | Masih terdapat anak putus sekolah |
| | | Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu |
| | | Rendahnya partisipatif perencanaan |

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati |
| | | Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu |
| | | Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah |
| | | Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal |
| | | Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal |
| | Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil | Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal |
| | | Masih terdapat kejadian ganguan trantibum |
| | | Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI |
| | | Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP |
| | | Sistem informasi daerah belum dikelola optimal |
| | | Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib |

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".***

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kepedulian sosial saling menghargai, tolong menolong dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam berbagai kemajemukan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat merasakan peran pemerintah dalam menegakkan dan memberikan rasa adil kepada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Jetis terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

| Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang BerBhineka Tunggal Ika" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| o | Misi RPJMD | Program Bupati-Wakil Bupati terpilih | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
| 1 | Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima. | 1. Pendidikan Anak Usia Dini | 1. Peranan lembaga swasta;<br>2. Kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan usia dini. | 1. Keterbatasan sarana prasarana;<br>2. Legalitas lembaga pendidikan |
| | | 2. Pos Pelayanan Terpadu | 1.Ketersediaan Sumber Daya Kalurahan;<br>2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait. | 1. Peranserta kader yang tidak stabil;<br>2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif;<br>3. Keterbatasan sarana prasarana |
| | | 3. SLRT/Puskesos | 1. Ketersediaan dukungan sumber daya Kalurahan;<br>2. Pembinaan dr instansi terkait. | 1. Keterbatasan sarana prasarana;<br>2. Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat kurang |
| | | 4. Kabupaten Layak Anak | 1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum | 1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kebijakan;<br>2. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan. | tentang regulasi terkait;<br>2. Keterbatasan sarana prasarana |
| | | 5. Ekonomi Kreatif | 1. Tersedia kegiatan pemberdayaan masyarakat;<br>2. Terdapat usaha mikro kecil di Kapanewon. | 1. Keterbatasan modal dan sarana prasarana usaha;<br>2. Keterbatasan akses promosi dan inovasi; |
| | | 6. Pemukiman bersih dan Sehat | 1. Kegiatan pemberdayaan kelestarian lingkungan;<br>2.Pembangunan drainase, pengelolaan limbah, dan sampah dalam RTRW kapanewon. | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap kelestarian lingkungan ;<br>2. Pengolahan sampah dengan metode 3R masih rendah |
| | | 7. Impelmentasi UU Cipta Kerja | 1. Terdapat Kawasan Industri sesuai RTRW;<br>2. Terdapat Kawasan pertambangan bahan mineral;<br>3. Proses IUMK lebih mudah dengan aplikasi;<br>4. Bonus | 1. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang memadahi;<br>2. Rendahnya ketersediaan tenaga kerja trampil;<br>3. Keterbatasan permodalan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Demografi pertambahan penduduk usia produktif; | 4. Rendahnya kemampuan dalam persaingan bisnis. |
| | | 8. Infrastruktur | 1. Pelaksanaan pagu indikatif Kapanewon;<br>2. Pembangunan dari Kalurahan. | 1. Rendahnya sinergitas pembangunan secara terpadu.<br>*2.* Adanya wabah *covid-19* yang mengakibatkan anggaran di*refocusing* untuk penanganan *covid-19.* |

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Jetis, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;
2. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi

terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;

3. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial disetiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat, terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
4. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki, untuk menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
8. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

## 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
   c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Pengawasan Internal.
   2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil

kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 0.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

| No | Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia | Masih adanya praktik politik yang tidak sehat | Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi |
| 2. | Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah | Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang | Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan |
| 3. | Meningkatnya kewaspadaan nasional | Masih adanya gerakan radikalisme | Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00 |
| 4. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas | Kapasitas Personil belum memadai | Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS |
| 5. | Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri | 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.<br>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.<br>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang | Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas |
| 6. | Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah | Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan | Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi |
| 7. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah<br>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang | Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD |
| 8. | Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data | sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif | 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan |

| No | Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | kependudukan untuk semua keperluan | | administrasi kependudukan<br>2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan |
| 9. | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan | Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah | Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 10. | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.<br>2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja | 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah<br>2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan.<br>3. Ketersediaan dana/anggaran |
| 11. | Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas | Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal | Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi |
| 12. | Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang | Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi |

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Jetis tidak ada keterkaitan langsung dengan Renstra DIY.

## 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Ditinjau dari Implikasi RTRW

| **Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang** | **Struktur/Pola Ruang Saat Ini** | **Indikasi Program Pemanfaatan Ruang** | **Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah** | **Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah** | **Faktor Penghambat** | **Faktor Pendorong** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telaah Rencana Struktur Ruang | | | | | | |
| Sistem Perkotaan dan Perdesaan | Sistem Perkotaan dan Perdesaan | Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, | Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien , tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan. | Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Jetis masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan | ~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur | ~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis | | | belum terpadu dan memadahi;<br>~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni;<br>~ Pola pikir masyarakat menuju perubahan , masih lambat. | pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan;<br>~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Darat | Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Canden- | Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian. | Jaringan jalan lokal sekunder Canden-Patalan- Trimulyo merupakan jalan penghubung lintas Provinsi, kecamatan dan kabupaten yg merupakan jalan | ~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon;<br>~ Perubahan prioritas | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;<br>~ Pemanfaatan CSR setempat; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Patalan-Trimulyo | | jaringan kolektor primer.Sumberagung -Canden merupakan jalan alternativ ke jalur utama wisata parangtritis. | anggaran pembangunan ;<br>~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah. | ~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan. |
| Sistem Jaringan Sistem Energi | Sistem Jaringan Energi listrik baku. | Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Jetis | Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang | Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya;<br>~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;<br>~ Program kegiatan pemberdayaan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kesejahteraan hidup masyarakat. | | pelaku dan pengguna. | dan pendampingan masyarakat.; |
| Sistem Jaringan Telekomunikasi | Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata | Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas, | Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif | Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Trimulyo dan kawasan yang berbukit lainnya. | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Jaringan Sumber Daya Air | ~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air beum termanfaatkan maksimal; | Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis | Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi. | ~ Kalurahan Trimulyo terdapat aliran sungai opak sebagai aliran utama untuk irigasi. | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya;<br>~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah, | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;<br>~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif. |
| Sistem Drainase Perkotaan | Sistem Drainase Belum Terpadu | Mendukung terciptanya Sistem Drainase Perkotaan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan | Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Jetis yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar. | ~ Kalurahan canden terdapat jaringan PDAM program KIMPRASWIL DIY yang bisa dikembangkan merata disetiap wilayah. | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis. | | | | |
| Sistem Penyediaan Air Bersih | Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata | Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di | Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Jetis yang kondisi air tanahnya berkapur besi. | ~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapanewon Jetis. | | | | |
| Sistem Persampahan. | Sistem pengelolaan sampah mandiri. | ~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu;<br>~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah secara mandiri sebagai sarana | ~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman;<br>~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah. | ~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya;<br>~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;<br>~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis. | | | | |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah. | Sistem Pengelolaan Air Limbah bersifat mandiri | ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan | ~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya;<br>~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam | ~ Kalurahan Trimulyo, Blawong sebagai kawasan siap bangun pemukiman | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ; | pengelolaan IPAL rumah tangga dan industri secara terpadu;<br>~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Penerangan Jalan | Sistem Penerangan Jalan tidak terpetakan | ~ Mendukung terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ; | ~ Melayani masyarakat dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan;<br>~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan | ~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalur Evakuasi Bencana | Jalur Evakuasi Bencana belum menyeluruh | ~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ; | ~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana. | ~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |
| | | | | | | |

| Telaah Rencana Pola Ruang | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasan Lindung Kabupaten | | | | | | |
| | Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya | ~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya | ~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat. | ~Rumah Joglo, Ngibikan,Sanden; Rumah bekas kalurahan lama Trimulyo; Sebaran Benda Lumpang Klaras Canden. | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya dikawasan cagar budaya | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kawasan Rawan Bencana | ~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan | ~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin. | ~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon;<br>~ Bencana kekeringan di Kalurahan Trimulyo, Blawong (Sindet) | ~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi;<br>~ Lokasi kekeringan | ~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan;<br>~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi terkait. |
| Kawasan Budidaya Kabupaten | | | | | | |
| | Kawasan Peruntukan Pertambangan | ~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan. | ~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. | ~Jenis tambang Kapanewon Jetis di Trimulyo, Blawong Bantaran kali opak berupa Batu kali dan pasir | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kawasan Peruntukan Industri | ~ Menciptakan kawasan indutri khas kewilayahan | ~ Menyediakan space pengembangan produk industri asli masyarakat setempat | ~ Kerajinan meubeler Patalan, Sumberagung dan Canden;<br>~ Kerajinan Batik Nitik Trimulyo;<br>~ Jamu Gendong; Canden, Kiringan<br>~ wedang Uwuh, Trimulyo; | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |
| | Kawasan Peruntukan Pariwisata | ~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur | ~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat | ~ Watu Ngelak, Trimulyo, Puton; | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dan promosi obyek wisata | | | | |
| | Kawasan Peruntukan Permukiman | ~ Rencana kawasan permukiman perkotaan | ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman | ~ Kalurahan Trimulyo, Blawong | ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya. | ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; |

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

## 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun kedepan. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis kapanewon Jetis dirumuskan dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal termasuk permasalahan pelayanan, adapun isu strategis Kapanewon Jetis dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Keterbatasan sarana prasarana, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon Jetis sebagai kawasan daerah wisata

# BAB IV.
# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Jetis

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan dan Sasaran** | **Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)** | **Target** | | | | | **Kondisi akhir Renstra** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** | |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,03 | 88,10 | 88,40 | 88,80 | 89,10 | 89,50 | 89,50 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |

# BAB V.
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi
      2. Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
      3. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
      4. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
      5. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyaraka;
      6. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
      7. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
      8. Berkedudukan sebagai koordnator wilayah;
      9. Terdapat Forum Forkompinkap;
      10. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.
   b. Kelemahan (*weakness*)
      1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
      2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
      3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
      4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
      5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal
    a. Peluang (*Opportunity*)
        1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
        2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
        3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
        4. Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat;
        5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
        6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
        7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
        8. Kawasan Lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya;
        9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
        10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
        11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
        12. Forum musrenbang berjenjang;
        13. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
        14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
        15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
        16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;
        17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten;
        18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.
    b. Ancaman (*threat*)
        1. Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan;
        2. Angka pengangguran bertambah;
        3. Masih terdapat anak putus sekolah;
        4. Masih terdapat anak stunting;
        5. Dampak Pandemi Covid-19;
        6. Kesenjangan sosial ekonomi makin leber;
        7. Alih fungsi lahan;
        8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;

9. Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

| No | FAKTOR INTERNAL | No | *Strength/kekuatan:* | No | *Weakness/kelemahan:* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 1 | Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | 1 | Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon |
| | | 2 | Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan | 2 | Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana |
| | | 3 | Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi | 3 | Pelayanan kepada masyarakat belum optimal |
| | | 4 | Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat | 4 | Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi |
| | | 5 | Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | 5 | Kondisi geografis wilayah yang berbukit |
| | | 6 | Akses kewilayahan horisontal dan vertikal | | |
| | | 7 | Berkedudukan sebagai koordnator wiayah | | |
| | | 8 | Terdapat Forum Forkompinkap | | |
| | | 9 | Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan | | |
| | FAKTOR EKSTERNAL | | | | |
| | *Opportunity/peluang:* | | Strategi S-O | | Strategi W-O |
| | | | | | |
| 1 | Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan | 1 | **Pemberdayaan masyarakat desa dan** | 1 | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kawasan industri/penyediaan sarana industri | | **kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)** | | **berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)** |
| 3 | Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan | | | | |
| 4 | Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat | | | | |
| 5 | Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata | | | | |
| 6 | Kawasan Peruntukan Pertambangan | 2 | **Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)** | 2 | **Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)** |
| 7 | Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat | | | | |
| 8 | Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya | | | | |
| 9 | Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana | | | | |
| 10 | Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan | | | | |
| 11 | Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah | | | | |
| 12 | Forum musrenbang berjenjang | | | | |
| 13 | Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan | | | | |
| 14 | Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan | | | | |
| 15 | Program Pembangunan Kewilayahan OPD | | | | |
| 16 | Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro | | | | |
| 17 | Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten | | | | |
| 18 | Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD | | | | |

| | *Threat/ancaman:* | | Strategi S-T | | Srategi W-T |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan | 1 | **Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)** | 1 | **Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)** |
| 2 | Angka pengangguran bertambah | | | | |
| 3 | Masih terdapat anak putus sekolah | | | | |
| 4 | Masih terdapat anak stunting | | | | |
| 5 | Dampak Pandemi Covid-19 | | | | |
| 6 | Kesenjangan sosial ekonomi makin leber | 2 | **Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)** | 2 | **Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)** |
| 7 | Alih fungsi lahan | | | | |
| 8 | Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi | | | | |
| 9 | Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan | | | | |
| 10 | Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya | | | | |
| 11 | Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP | | | | |
| 12 | Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen. | | | | |

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Jetis. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilihi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.**

   Penetapan wilayah Kapanewon Jetis dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air,suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. **Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.**

   Kapanewon Jetis berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Jetis sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

Kapanewon Jetis dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun verrikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan perananan masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

Kapanewon Jetis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum.**

Kapanewon Jetis merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Jetis dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum.

7. **Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang

berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. **Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| Visi : | Uraian Visi | | |
| | Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. | | |
| Misi I : | Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | ArahKebijakan |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif. |
| | | Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat | Peningkatan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis |

# BAB VI.
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

# Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon** | | | | | | | | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **Nilai rata-rata SKM perangkat daerah** | **88,03 Angka** | **88,1 Angka** | | **88,4 Angka** | | **88,8 Angka** | | **89,1 Angka** | | **89,5 Angka** | | **89,5 Angka** | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat** | | | | | | | **IKM Kapanewon** | **Nilai SKM perangkat daerah** | **92,45 Angka** | **90 Angka** | | **91 Angka** | | **92 Angka** | | **93 Angka** | | **94 Angka** | | **94 Angka** | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat** | **04** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%** | **n/a** | **100 persen** | **45.300.000** | **100 persen** | **66.040.000** | **100 persen** | **66.040.000** | **100 persen** | **66.040.000** | **100 persen** | **66.040.000** | **100 persen** | **309.460.000** | **Jawatan Praja** | **Kapanewon Jetis** |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan** | **n/a** | **0 persen** | **-** | **82 persen** | **50.000.000** | **83 persen** | **50.000.000** | **84 persen** | **50.000.000** | **85 persen** | **50.000.000** | **85 persen** | **200.000.000** | **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |
| | | **0 4** | **0 1** | **0 4** | **2 . 0 6** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%** | | **100 persen** | **45.300.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **245.300.000** | **Jawatan Praja** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 2 . 0 6 | 0 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | | n/a | 3 dokumen | 45.300.000 | 3 dokumen | 50.000.000 | 3 dokumen | 50.000.000 | 3 dokumen | 50.000.000 | 3 dokumen | 50.000.000 | 15 dokumen | 245.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | | n/a | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 20 okumen | | | |
| | | **04** | **01** | **04** | **2.02** | | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%** | | **0 persen** | **-** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **50.000.000** | **100 persen** | **200.000.000** | **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 04 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | | n/a | | | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 5 Dokumen | 200.000.000 | | |
| | | | | | | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | | n/a | | | 20 Orang | | 20 Orang | | 20 Orang | | 20 Orang | | 80 Orang | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **07** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah** | **80 angka** | **80 angka** | **2.860.739.742** | **81 Angka** | **3.017.182.842** | **81 Angka** | **3.291.137.342** | **82 Angka** | **3.585.750.842** | **82 Angka** | **4.276.394.842** | **82 Angka** | **17.031.205.610** | | **Kapanewon Jetis** |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **79 Angka** | **100 persen** | **7.225.000** | **100 persen** | **22.000.000** | **100 persen** | **42.000.000** | **100 persen** | **74.000.000** | **100 persen** | **141.849.000** | **100 persen** | **287.074.000** | **Sub Bagian Program Keuangan** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | | 5 dokumen | 6 Dokumen | 2.125.000 | 6 Dokumen | 10.000.000 | 6 Dokumen | 20.000.000 | 6 Dokumen | 40.000.000 | 6 Dokumen | 80.000.000 | 30 Dokumen | 152.125.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen hasil Evaluasi | | 7 dokumen | 4 dokumen | 5.100.000 | 4 dokumen | 12.000.000 | 4 dokumen | 22.000.000 | 4 dokumen | 34.000.000 | 4 dokumen | 61.849.000 | 20 dokumen | 134.949.000 | | |
| | | | | | | | | Dokumen Keuangan | | | | | 28 dokumen | | 28 dokumen | | 28 dokumen | | 28 dokumen | | 140 dokumen | | | |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **100 persen** | **80 angka** | **2.328.910.242** | **82 angka** | **75.000.000** | **83 angka** | **2.395.358.342** | **84 angka** | **2.433.339.342** | **85 angka** | **2.554.134.342** | **85 angka** | **12.065.356.610** | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.02** | **02** | Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | 14 kali | 14 kali | 1.481.579.900 | 14 kali | 1.489.284.000 | 14 kali | 1.511.028.000 | 14 kali | 1.529.009.000 | 14 kali | 1.549.804.000 | 14 kali | 7.560.704.900 | | |
| | | | | | | | | Pembayaran TPP | | 12 kali | 12 kali | 789.330.342 | 12 kali | 789.330.342 | 12 kali | 789.330.342 | 12 kali | 789.330.342 | 12 kali | 789.330.342 | 12 kali | 5.428.231.610 | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian | | 108 orang bulan | 12 ob | 45.360.000 | 12 ob | 75.000.000 | 12 ob | 95.000.000 | 12 ob | 115.000.000 | 12 ob | 215.000.000 | 60 ob | 545.360.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **80 angka** | **100 persen** | **132.371.144** | **100 persen** | **150.000.225** | **100 persen** | **190.000.000** | **100 persen** | **228.000.000** | **100 persen** | **330.000.000** | **100 persen** | **1.030.371.369** | **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | | 12 bulan | 13 jenis | 5.000.000 | 13 jenis | 15.000.000 | 13 jenis | 18.000.000 | 13 jenis | 24.000.000 | 13 jenis | 27.500.000 | 13 jenis | 89.500.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | | 15 jenis | 18 jenis | 22.352.144 | 18 jenis | 22.000.225 | 18 jenis | 32.000.000 | 18 jenis | 35.000.000 | 18 jenis | 50.000.000 | 18 jenis | 161.352.369 | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | | 10 jenis | 30 jenis | 5.000.000 | 30 jenis | 15.000.000 | 30 jenis | 20.000.000 | 30 jenis | 25.000.000 | 30 jenis | 40.000.000 | 30 jenis | 105.000.000 | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | | 4 jenis | 4 jenis | 16.010.000 | 4 jenis | 15.000.000 | 4 jenis | 20.000.000 | 4 jenis | 22.000.000 | 4 jenis | 45.000.000 | 4 jenis | 118.010.000 | | |
| | | | | | | | | Pengandaan | | 30.000 lembar | 30.000 lembar | | 30.000 lembar | | 30.000 lembar | | 30.000 lembar | | 30.000 lembar | | 150.000 lembar | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | | 3 jenis | 1 jenis | 3.600.000 | 1 jenis | 4.000.000 | 1 jenis | 6.000.000 | 1 jenis | 8.000.000 | 1 jenis | 12.000.000 | 1 jenis | 33.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | | 22 dokumen | 40 dokumen | 78.709.000 | 45 dokumen | 75.500.000 | 50 dokumen | 90.500.000 | 55 dokumen | 110.000.000 | 60 dokumen | 150.000.000 | 200 dokumen | 504.709.000 | | |
| | | | | | | | | Perjalanan dinas dalam daerah | | 340 op | 300 op | | 300 op | | 300 op | | 300 op | | 300 op | | 1.500 op | | | |
| | | | | | | | | Perjalanan dinas luar daerah | | 0 op | 5 op | | 5 op | | 5 op | | 5 op | | 5 op | | 25 op | | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Laporan penataan arsip | | 0 | 2 dokumen | 1.700.000 | 2 dokumen | 3.500.000 | 2 dokumen | 3.500.000 | 2 dokumen | 4.000.000 | 2 dokumen | 5.500.000 | 10 dokumen | 18.200.000 | | |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **100 persen** | **100 persen** | **71.120.000** | **100 persen** | **94.372.250** | **100 persen** | **146.583.250** | **100 persen** | **213.215.250** | **100 persen** | **313.215.250** | **100 persen** | **838.506.000** | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 01 | 2. | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan mebeler | | 1 jenis | 2 unit | 46.020.000 | 2 unit | 43.872.250 | 2 unit | 61.583.250 | 2 unit | 92.715.250 | 2 unit | 128.215.250 | 10 unit | 372.406.000 | Sub Bagian Umum | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Kepegawaian | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | 2 jenis | 5 jenis | 25.100.000 | 5 jenis | 50.500.000 | 5 jenis | 85.000.000 | 5 jenis | 120.500.000 | 5 jenis | 185.000.000 | 5 jenis | 466.100.000 | | |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **80 angka** | **100 persen** | **158.668.916** | **100 persen** | **170.000.000** | **100 persen** | **220.000.000** | **100 persen** | **270.000.000** | **100 persen** | **370.000.000** | **100 persen** | **1.188.668.916** | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | | 570 lembar | 400 lembar | 3.000.000 | 400 lembar | 6.000.000 | 400 lembar | 8.000.000 | 400 lembar | 10.000.000 | 400 lembar | 12.000.000 | 2.000 lembar | 39.000.000 | Sub Bagian Umum dan | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik, air dan telepon | | 12 bulan | 12 bulan | 43.200.000 | 12 bulan | 54.000.000 | 12 bulan | 82.000.000 | 12 bulan | 90.000.000 | 12 bulan | 128.000.000 | 60 bulan | 397.200.000 | Kepegawaian | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | | 0 | 8 jenis | 21.980.000 | 8 jenis | 50.000.000 | 8 jenis | 60.000.000 | 8 jenis | 80.000.000 | 8 jenis | 100.000.000 | 8 jenis | 311.980.000 | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | | 24 ob | 2 dokumen | 90.488.916 | 2 dokumen | 60.000.000 | 2 dokumen | 70.000.000 | 2 dokumen | 90.000.000 | 2 dokumen | 130.000.000 | 10 dokumen | 440.488.916 | | |
| | | | | | | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | | 12 ob | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | | 24 ob | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 10 dokumen | | | |
| | | | | | | | | Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon | | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 4 dokumen | | | |
| | | | | | | | | Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN | | 108 ob | 60 ob | | 60 ob | | 60 ob | | 60 ob | | 60 ob | | 300 ob | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **07** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **100 persen** | **100 persen** | **162.447.440** | **100 persen** | **152.196.025** | **100 persen** | **202.196.250** | **100 persen** | **252.196.250** | **100 persen** | **352.196.250** | **100 persen** | **1.121.232.215** | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan | | 7 unit | 1 unit | 146.750.000 | 1 unit | 95.196.250 | 1 unit | 120.500.000 | 1 unit | 150.000.000 | 1 unit | 210.000.000 | 5 unit | 722.446.250 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan | | 7 unit | 6 unit | | 6 unit | | 6 unit | | 6 unit | | 6 unit | | 30 unit | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran | | 4 kali | 0 | - | 5 jenis | 20.000.000 | 5 jenis | 30.000.000 | 5 jenis | 40.000.000 | 5 jenis | 40.000.000 | 5 jenis | 130.000.000 | | |
| | | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | | 1 unit | 2 unit | 15.697.440 | 2 unit | 36.999.775 | 2 unit | 51.696.250 | 2 unit | 62.196.250 | 2 unit | 102.196.250 | 10 unit | 268.785.965 | | |
| | | **07** | **01** | **02** | **2.01** | **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%** | **90 persen** | **91 persen** | **25.475.000** | **92 persen** | **28.187.500** | **93 persen** | **28.187.500** | **94 persen** | **28.187.500** | **94 persen** | **28.187.500** | **94 persen** | **138.225.000** | | **Kapanewon Jetis** |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **07** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **95 persen** | **100 persen** | **11.350.000** | **100 persen** | **16.187.500** | **100 persen** | **16.187.500** | **100 persen** | **16.187.500** | **100 persen** | **16.187.500** | **100 persen** | **76.100.000** | **jawatan Praja** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan koordinasi forkompimkap | | 6 dokumen | 4 Dokumen | 5.400.000 | 4 Dokumen | 9.000.000 | 4 Dokumen | 9.000.000 | 4 Dokumen | 9.000.000 | 4 Dokumen | 9.000.000 | 20 Dokumen | 41.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | | 6 dokumen | 6 Dokumen | 5.950.000 | 6 Dokumen | 7.187.500 | 6 Dokumen | 7.187.500 | 6 Dokumen | 7.187.500 | 6 Dokumen | 7.187.500 | 30 Dokumen | 34.700.000 | | |
| | | **07** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **90 angka** | **100 persen** | **14.125.000** | **100 persen** | **12.000.000** | **100 persen** | **12.000.000** | **100 persen** | **12.000.000** | **100 persen** | **12.000.000** | **100 persen** | **62.125.000** | **jawatan Pelayanan** | **Kapanewon Jetis** |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | 0 | 2 Dokumen | 14.125.000 | 2 Dokumen | 12.000.000 | 2 Dokumen | 12.000.000 | 2 Dokumen | 12.000.000 | 2 Dokumen | 12.000.000 | 10 Dokumen | 62.125.000 | | |
| | | | | | | | | Masyarakat yang dilayani | | 4000 orang | 5250 orang | | 5350 orang | | 5450 orang | | 5550 orang | | 5650 orang | | 27.250 orang | | | |
| | | | | | | | | Jenis Layanan yang diberikan | | 14 jenis | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%) )/2 | 85 persen | 92 persen | 130.585.000 | 93 persen | 161.266.500 | 94 persen | 161.266.500 | 95 persen | 161.266.500 | 95 persen | 161.266.500 | 95 persen | 775.651.000 | | Kapanewon Jetis |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **07** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **85 persen** | **100 persen** | **96.565.000** | **100 persen** | **100.000.000** | **100 persen** | **100.000.000** | **100 persen** | **100.000.000** | **100 persen** | **100.000.000** | **100 persen** | **496.565.000** | **Jawatan Kemakmuran** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | | 2 dokumen | 2 dokumen | 19.612.500 | 2 dokumen | 40.000.000 | 2 dokumen | 40.000.000 | 2 dokumen | 40.000.000 | 2 dokumen | 40.000.000 | 10 dokumen | 179.612.500 | | |
| | | | | | | | | monev pedukuhan | | 0 | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | | 20 Dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Bidang Sosial | | 10 dokumen | 6 dokumen | 76.952.500 | 6 dokumen | 60.000.000 | 6 dokumen | 60.000.000 | 6 dokumen | 60.000.000 | 6 dokumen | 60.000.000 | 30 dokumen | 316.952.500 | | |
| | | **07** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | | **100 persen** | **34.020.000** | **100 persen** | **61.226.500** | **100 persen** | **61.226.500** | **100 persen** | **61.226.500** | **100 persen** | **61.226.500** | **100 persen** | **278.926.000** | **Jawatan Kemakmuran** | **Kapanewon Jetis** |
| | | 07 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | | 8 dokumen | 5 dokumen | 34.020.000 | 5 dokumen | 61.226.500 | 5 dokumen | 61.226.500 | 5 dokumen | 61.226.500 | 5 dokumen | 61.226.500 | 25 dokumen | 278.926.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | 100 peren | 100 persen | 119.087.500 | 100 persen | 133.012.500 | 100 persen | 133.012.500 | 100 persen | 133.012.500 | 100 persen | 133.012.500 | 100 persen | 651.137.500 | | Kapanewon Jetis |
| | | 07 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% | | 100 Persen | 119.087.500 | 100 Persen | 133.012.500 | 100 Persen | 133.012.500 | 100 Persen | 133.012.500 | 100 Persen | 133.012.500 | 100 Persen | 651.137.500 | Jawatan Keamanan | Kapanewon Jetis |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan penanggulangan bencana | | 2 dokumen | 1 dokumen | 119.087.500 | 2 dokumen | 133.012.500 | 2 dokumen | 133.012.500 | 2 dokumen | 133.012.500 | 2 dokumen | 133.012.500 | 10 dokumen | 651.137.500 | | **Kapanewon Jetis** |
| | | | | | | | | Laporan kejadian trantibum di kapanewon | | 2 dokumen | 1 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | 20 dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | | 4 dokumen | 12 dokumen | | 12 dokumen | | 12 dokumen | | 12 dokumen | | 12 dokumen | | 60 dokumen | | | |
| | | **07** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **Cakupan Wilayah Pelayanan** | **100 persen** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **15.000.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **36.000.000** | | **Kapanewon Jetis** |
| | | **07** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%** | **100 persen** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **15.000.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **5.250.000** | **100 persen** | **36.000.000** | **Jawatan Praja** | **Kapanewon Jetis** |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 07 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta | Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional | | 4 dokumen | 2 dokumen | 5.250.000 | 2 dokumen | 5.250.000 | 2 dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 5.250.000 | 2 dokumen | 5.250.000 | 10 dokumen | 26.000.000 | | |
| | | | | | | | Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Laporan Monev Pilkada | | 0 | | | | | 1 dokumen | 10.000.000 | | | | 1 dokumen | 10.000.000 | | |
| | **JUMLAH** | | | | | | | | | | | **3.186.437.242** | | **3.460.** | | **3.744.** | | **4.029.** | | **4.720.** | | **19.141.679.110** | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Formula | Kinerja Tahun 2021 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | **939.342** | | **643.842** | | **507.342** | | **151.342** | | | | |

*Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

# BAB VII.
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| I | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,03 | 88,10 | 88,40 | 88,80 | 89,10 | 89,50 | 89,50 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) Kapanewon | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | |
| 1.1 | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **n/a** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** | **Jawatan Praja** |
| | **Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **n/a** | **0 Persen** | **82 Persen** | **83 Persen** | **84 Persen** | **85 Persen** | **85 Persen** | **Sub Bagian Umum Sekretariat** |
| 1.1.1 | Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | n/a | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | Jawatan Praja |
| 1.1.2 | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | n/a | 0 Persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | Sub Bagian Umum Sekretariat |
| **1.2** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **100** | **91** | **92** | **93** | **94** | **94** | **94** | **jawatan Praja dan jawatan pelayanan** |

| No | Indikator | Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| 1.2.1 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jawatan Praja |
| 1.2.2 | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | jawatan Pelayanan |
| **1.3** | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **100** | **92** | **93** | **94** | **95** | **95** | **95** | **Jawatan Kemakmuran** |
| 1.3.1 | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jawatan Kemakmuran |
| 1.3.2 | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jawatan Kemakmuran |
| **1.4** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Jawatan Keamanan** |
| 1.4.1 | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jawatan Keamanan |
| **1.5** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Jawatan Praja** |
| 1.5.1 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jawatan Praja |

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Jetis yang disusun sesui dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Jetis serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam dalam menyusun Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Demikian Renstra Pembangunan Kapanewon Jetis disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Jetis bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....